

Pemilihan Umum 1987

M. SUDIBJO*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum dalam masa Era Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan yang keempat dalam pemerintahan Orde Baru telah berlangsung secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memperebutkan 400 kursi di DPR,¹ sekaligus untuk mengisi keanggotaan MPR periode 1987-1992. Hasil-hasilnya pun telah dapat diketahui dari pengumuman Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada tanggal 6 Juni 1987.

Hasil perhitungan suara itu menunjukkan bahwa Golongan Karya tetap memenangkan pemilihan umum itu sebagaimana halnya pada Pemilihan Umum tahun 1971, 1977 dan tahun 1982. Secara singkat hasil pemilihan umum itu adalah sebagai berikut: (1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bertandakan gambar bintang mengalami kemunduran; dia hanya memperoleh 61 kursi di DPR atau sekitar 15,97% jumlah suara yang masuk; (2) Golkar yang tetap bertandakan gambar beringin memperoleh 299 kursi di DPR atau sekitar 73,17% suara yang masuk; sedangkan (3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang bertandakan gambar kepala banteng memperoleh 40 kursi DPR dari 10,87% jumlah suara yang masuk. Ini berarti bahwa PDI mengalami kenaikan, baik dalam jumlah kursi DPR maupun jumlah suara.

Dalam tulisan ini akan dilakukan pengkajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suasana Pemilihan Umum 1987. Selanjutnya akan diperhatikan beberapa perubahan sebagai hasil pemilihan umum, seperti perubahan dalam partisipasi rakyat, pembagian suara di antara para Organisasi Peserta Pemilihan Umum (OPP = kontestan) pada tingkat nasional, perubahan pembagian suara pada tingkat propinsi dan perubahan pembagian kursi di DPR

*Staf CSIS.

¹Pemilihan umum ini juga untuk memilih anggota DPRD I dan DPRD II.

pada tingkat propinsi, serta perubahan jumlah MPR yang dipilih dan diangkat. Akhirnya akan dibahas beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan hasil pemilihan umum.

SUASANA DAN HASIL PEMILIHAN UMUM 1987

Jauh-jauh hari sebelum Pemilihan Umum 1987 dilangsungkan, para pengamat politik pada umumnya telah meramalkan bahwa Golongan Karya akan memenangkan pemilihan umum, PPP akan mengalami kemunduran karena beberapa masalah intern yang harus diselesaikan, dan PDI bagaimanapun juga pasti akan naik karena hasil Pemilihan Umum 1982 terlalu kecil baginya, dan tampak adanya konsolidasi ke dalam yang sungguh-sungguh sejak Kongres PDI ke-3 tahun 1985. Ramalan-ramalan tersebut kini telah menjadi kenyataan. Dari pengamatan-pengamatan selama ini tampak beberapa faktor yang sangat mempengaruhi suasana dan hasil Pemilihan Umum 1987 tersebut. Dua faktor utama adalah penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kedua, sikap ABRI yang bertindak adil dan korek dalam pemilihan umum yang lalu.

Diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas mengandung arti bahwa asas yang merupakan kekhususan OPP dan kemudian dijadikan ideologi partai tidak mempunyai tempat lagi dalam bentuknya yang eksplisit. Diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas antara lain untuk menjadi landasan tumbuhnya budaya politik yang sesuai dengan dasar dan ideologi kita, di samping untuk mengakhiri fase konflik ideologis dan tercapainya integrasi bangsa secara lebih dalam dan nyata, telah menunjukkan tanda-tanda awal yang menggembirakan. Pertentangan ideologis antara lain karena masih tercantumnya asas ciri khusus seperti pada Pemilu-pemilu sebelumnya telah jauh berkurang. Sementara itu, dibandingkan dengan Pemilihan Umum 1977 dan 1982, secara nasional Pemilihan Umum 1987 jauh lebih tenang, kebringasan-kebringasan sosial jauh menurun. Meskipun di beberapa daerah masih dijumpai kebringasan-kebringasan, intensitasnya dapat dikatakan cukup rendah. Dalam kaitan ini masih perlu dikaji sejauh mana hal ini menambah atau mengurangi suara yang diperoleh oleh masing-masing OPP.

Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tampaknya juga mempengaruhi tema-tema kampanye yang dilontarkan oleh para OPP. Tema keagamaan ataupun isu keagamaan yang begitu menonjol pada Pemilihan Umum 1977 dan 1982, tidak begitu tampak lagi. Namun demikian sisa-sisa praktek kebiasaan lama di beberapa daerah masih menunjukkan diri, baik pada sementara pimpinan organisasi peserta pemilihan umum maupun pada sebagian masyarakat. Hal itu kiranya merupakan suatu gejala yang wajar, karena perubahan praktek dan pola budaya politik lama yang telah begitu mendalam dalam diri beberapa kalangan memerlukan waktu yang cukup

lama. Misalnya beberapa tokoh masyarakat masih melakukan pendekatan spiritual keagamaan untuk melihat dimensi-dimensi etis dari pembangunan. Bahkan dalam suatu kampanyenya di salah satu tempat di Jakarta pembicara Golongan Karya terang-terangan menyatakan bahwa kampanyenya itu bercorak keagamaan. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa isu-isu keagamaan telah mulai ditinggalkan oleh para peserta Pemilu.

Berkurangnya isu keagamaan itu merupakan suatu kemajuan yang sangat besar untuk masa-masa mendatang dalam pembangunan politik nasional, karena dalam perspektif pembangunan politik jangka panjang agama mempunyai tempat dan peranan yang terpisah dari politik, dalam arti agama tidak menjadi penyekat bangsa Indonesia melainkan menjadi perekat yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Secara lebih khusus para organisasi peserta pemilihan umum dapat lebih berorientasi pada program dan menjadi partai terbuka, dalam arti para anggotanya dapat terdiri dari berbagai suku, keturunan dan agama, sedangkan alasan-alasan primordial tidak lagi menjadi halangan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi suasana pemilihan umum adalah sikap ABRI yang tegas dan korek dalam melaksanakan tugasnya. Pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat yang terlontar dalam masyarakat pada umumnya mengakui dan memuji sikap ABRI yang ditunjukkan selama Pemilihan Umum 1987 itu. ABRI bersikap netral dan tidak memihak sesuatu OPP. ABRI melakukan tugasnya secara adil, dan tanpa mendukung satu kontestan pun secara nyata. Karena itu martabat ABRI telah menaik di mata rakyat. Keadilan yang dirasakan oleh masyarakat ini pula yang membuat Pemilihan Umum 1987 kurang bringas daripada pemilihan umum sebelumnya (1971, 1977 dan terutama 1982), meskipun berkurangnya pertentangan ideologi sebagai akibat diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas telah jelas ikut membantu ketenangan yang terjadi selama kampanye. Sikap ABRI yang demikian ini kiranya akan mempunyai dampak yang cukup dalam dan jauh, karena hal ini menunjukkan bahwa ABRI secara sungguh-sungguh dapat menyesuaikan peran sosial-politiknya dengan perkembangan zaman, yaitu di mana dibutuhkan mereka harus berada di atas semua golongan dan bila mereka harus bersikap "tut wuri handayani" mereka pun mampu melakukannya. Kiranya ABRI tidak hanya sebagai katalisator dan stabilisator, tetapi dia akan berkembang menjadi kekuatan demokratisasi untuk masa-masa yang akan datang. Secara khusus harus disebut bahwa polisi yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilihan umum telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan moril seluruh angkatan tersebut dan mengangkat penghargaan masyarakat terhadap mereka. Karena sikap ABRI yang demikian itulah, maka pernyataan generasi muda dan *protest voters* berani menampakkan diri dan sebagian dari mereka tampaknya menyalurkan aspirasinya melalui PDI.

Peran ABRI yang terbuka dan adil (tidak memihak) terhadap OPP atau masyarakat ikut menciptakan berkembangnya demokrasi Pancasila. Peran yang demikian ini akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan politik yang sehat dan kuat. Ideologi Pancasila semakin nyata diterima dan tidak menjadi soal yang dipertentangkan dalam masyarakat lagi, yang dahulu selalu harus menjadi perhatian ABRI.

BEBERAPA PERUBAHAN

Tabel di bawah ini (Tabel 1) akan menjelaskan beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk mengkaji beberapa perubahan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 1987. Tabel ini menunjukkan bahwa berdasarkan

Tabel 1

PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM

	1982	1987	Kenaikan	%
1. Jumlah penduduk	146.531.733	162.921.887	16.390.154	11,185
2. Jumlah pemilih terdaftar	82.133.639	93.965.955	11.832.313	14,406
3. Jumlah suara sah	75.126.306	85.809.816	10.683.510	14,22
4. Persentase penduduk yang terdaftar untuk Pemilu	56,051%	57,675%	1,624%	
5. Persentase penduduk yang memberikan suara sah	51,269%	52,669%	1,4%	
6. Persentase pemilih terdaftar yang memberikan suara	91,468%	91,320%	-0,148%	

persentase yang ada, partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 1987 tidak begitu banyak berubah dari Pemilihan Umum 1982. Memang terjadi perubahan, tetapi tidak menyolok. Perubahan hanya bersifat gradual. Persentase pemilih yang memberikan suara sahnya masih tetap di atas 90% sebagaimana Pemilihan Umum 1982. Ini berarti bahwa partisipasi rakyat dalam pemilihan umum tinggi. Persentase suara sah yang masuk ini bila dibandingkan dengan hal sama pada Pemilihan Umum 1982 mengalami kemunduran, tetapi sangat kecil, yaitu 0,148% (bandingkan pula dengan Tabel 2 berikut ini).

Meskipun angka-angka itu tidak dapat membedakan antara mereka yang tidak memberikan suara dan mereka yang suaranya dinyatakan tidak sah, beberapa hipotesa dapat dikemukakan sehubungan dengan masalah ini. Mungkinkah partisipasi rakyat yang tinggi dalam Pemilihan Umum 1987 merupakan peningkatan kesadaran politik rakyat sebagai hasil pembangunan politik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru? Tampaknya, hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut, karena sikap politik tidak dapat sekedar didasarkan pada angka-angka seperti di atas.

Tabel 2

PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM

	1977*	1982	Kenaikan	%
1. Jumlah penduduk	129.842.846	146.531.733	16.688.887	12,853
2. Jumlah pemilih terdaftar	70.662.155	82.133.639	11.471.484	16,234
3. Jumlah suara sah	63.998.344	75.126.306	11.127.962	17,387
4. Persentase penduduk yang terdaftar untuk Pemilu	54,421%	56,051%	1,630%	
5. Persentase penduduk yang memberikan suara sah	49,289%	51,269%	1,980%	
6. Persentase pemilih terdaftar yang memberikan suara sah	90,569%	91,468%	0,899%	

Catatan: *Belum termasuk Timor Timur.

Untuk lebih menjelaskan partisipasi politik rakyat, mungkin hasil survei yang diselenggarakan oleh CSIS dapat memberikan gambaran. Dalam survei tersebut dapat diketahui bahwa secara kuantitatif partisipasi rakyat dalam pemilihan umum adalah tinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang kegiatan memberi suara itu sebagai suatu kewajiban moral. Di samping itu, pola panutan cukup dominan dalam masyarakat Indonesia yang masih tradisional paternalistik. Karena itu usaha para pemimpin, terutama pemimpin formal,² yang terus-menerus menganjurkan agar para pemilih menggunakan hak-hak mereka, akan sangat berpengaruh atas sikap politik rakyat. Oleh karena itu kiranya kurang tepat menafsirkan penyelenggaraan pemilihan umum di negara-negara Barat, seperti di Amerika Serikat, sebagai sesuatu yang ideal bagi Indonesia. Partisipasi rakyat dalam pemilihan umum di Amerika Serikat sangat rendah, hanya sekitar 52%. Hal ini disebabkan masyarakat negara tersebut telah mempunyai alternatif lain untuk menyalurkan aspirasinya, misalnya melalui pers atau kelompok penekan (*pressure groups*). Di Belanda, secara teoritis partisipasi rakyat yang berhak memilih di negara itu juga relatif rendah, karena di sana kartu suara dapat diwakilkan kepada seseorang.

Sementara itu dalam Tabel 3 berikut ini dapat dijumpai pembagian suara pada tingkat nasional sebagai hasil Pemilihan Umum 23 April 1987 yang baru lalu.

²Biasanya pemimpin-pemimpin itu dibagi dalam tiga kelompok, yakni pemimpin formal, pemimpin agama dan pemimpin masyarakat. Pemimpin formal adalah mereka yang menduduki jabatan-jabatan resmi dalam pemerintahan yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan tertentu dan mempunyai hirarki yang jelas, seperti gubernur, bupati, camat dan lurah. Pemimpin agama ialah mereka yang karena jabatannya menjadi pemimpin agama, atau yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan lebih banyak dari rata-rata orang. Biasanya pemimpin semacam ini pengaruhnya tidak semata-mata dalam bidang agama, tetapi juga di bidang-bidang lain. Yang disebut sebagai pemimpin masyarakat adalah mereka yang secara adat menjadi pemimpin sekelompok manusia atau suku, misalnya kepala suku, kepala-kepala adat, kepala atau pemimpin marga.

Tabel 3

PEMBAGIAN SUARA PADA TINGKAT NASIONAL

	Hasil Pemilu 1982	Kenaikan yang di- harapkan*	Hasil yang diharapkan: pada Pemilu 1987	Hasil pada Pemilu 1987	Kenaikan nominal	Kenaikan riil**
	(a)	(b)	(a + b) (c)	(d)	(d-a) (e)	(d-c) (f)
PPP	20.871.880	2.968.133	23.840.013	13.701.428	-7.170.452 (-34,35%)	-10.138.585 (-48,58%)
Golkar	48.334.724	6.873.551	55.208.275	62.783.680	14.448.956 (29,89%)	7.575.405 (15,67%)
PDI	5.919.702	841.825	6.761.527	9.324.708	3.405.006 (57,52%)	2.563.181 (43,30%)
Jumlah	75.126.306			85.809.816		

Catatan: *Kenaikan yang diharapkan adalah berdasarkan asumsi bahwa pilihan para pemilih di tahun 1987 tepat sama dengan pada tahun 1982. Berdasarkan syarat ini semua kenaikan dalam jumlah suara yang diperoleh setiap organisasi peserta pemilihan umum harus ditambah dengan peningkatan jumlah pemilih. Karena diketahui bahwa antara tahun 1982 dan 1987 jumlah pemilih meningkat sebesar 14,22%, maka besarnya kenaikan yang diharapkan untuk setiap organisasi peserta pemilihan umum dapat dihitung dengan mengalikan jumlah suara masing-masing di tahun 1982 dengan 14,22%.

**Kenaikan riil ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana pembagian suara di antara ketiga organisasi peserta pemilihan umum tahun 1987 menyimpang atau berubah dari yang diharapkan berdasarkan hasil dari Pemilihan Umum 1982.

Angka-angka yang diketengahkan dalam Tabel 3 tersebut berdasarkan hipotesa awal bahwa setiap peningkatan jumlah pemilih yang ikut serta dalam Pemilihan Umum 1987 akan menunjukkan pola pilihan yang sama seperti ditunjukkan dalam Pemilihan Umum 1982. Dengan kata lain, jika tingkah laku memilih di Indonesia merupakan satu gejala yang statis, hasil pemilihan umum yang baru lalu itu dapat dengan tepat diramalkan hanya dengan mengetahui besarnya kenaikan jumlah pemilih. Namun angka-angka tersebut tidak menunjukkan hal yang demikian. Ternyata telah terjadi sedikit perubahan dalam perolehan suara. PPP mengalami kemunduran, sedangkan Golkar dan PDI meningkat. PPP mengalami penurunan penghasilan suara, baik dalam kenaikan nominal maupun kenaikan riil. Dari perhitungan itu ternyata bahwa PPP kehilangan lebih dari 10 juta suara yang seharusnya didapat dalam Pemilihan Umum 1987. Adakah hal ini memberi tanda atas mengurangnya popularitas PPP di antara para pemilihnya maupun pemilih-pemilih baru, masih sulit dibuktikan.

Sementara itu diperlihatkan pula terjadinya pergeseran angka-angka yang diperoleh oleh Golkar maupun PDI. Baik Golkar maupun PDI mendapatkan kenaikan nominal maupun kenaikan riil. Penurunan riil yang diderita oleh PPP terserap ke dalam suara Golkar dan PDI. Meskipun jumlah kenaikan riil yang diperoleh oleh Golkar jauh lebih besar dari kenaikan riil PDI, secara

persentase PDI mengalami kenaikan yang lebih besar, yaitu 43,30%, sedangkan Golkar hanya 15,67%. Suatu perincian dari angka-angka yang dapat diperbandingkan untuk tiap-tiap OPP menurut propinsi dapat dilihat dalam Lampiran II, III dan IV.

Namun demikian besarnya persentase yang diperoleh oleh PDI belum tentu dapat menambah jumlah kursinya di DPR, karena masih harus dikaitkan dengan angka pembagi pemilihan yang disesuaikan dengan kursi DPR yang diperebutkan dan jumlah penduduk ataupun pertambahan penduduk pemilih. Di samping itu kuantitas suara yang diperoleh PDI pada tahun 1982 di beberapa daerah sangat kecil, sehingga pelipatgandaan suara yang diperoleh PDI di beberapa daerah belum berarti dapat menambah kursi di DPR. Tetapi kenaikan itu bagi PDI di beberapa daerah telah berhasil menempatkan dirinya

Tabel 4

**KEMENANGAN RIIL, PERTAMBAHAN KURSI DPR
DAN NOMOR URUT PEROLEHAN SUARA**

No. Daerah Pemilihan	PPP			GOLKAR			PDI		
	A (%)	B	C	A (%)	B	C	A (%)	B	C
1. DI Aceh	-32,06	-2	II	47,68	1	I	33,30	I	III
2. Sumatra Utara	-39,11	-1	III	0,34	1	I	110,48	2	II
3. Sumatra Barat	-59,44	-2	II	36,37	2	I	130,03	..	III
4. Riau	-52,57	-1	II	14,14	2	I	135,42	..	III
5. Sumatra Selatan	-61,28	-2	II	28,64	3	I	122,80	1	III
6. Jambi	-48,50	..	II	5,74	..	I	132,09	..	III
7. Bengkulu	-84,12	..	II	27,81	..	I	72,79	..	III
8. Lampung	-92,12	-1	II	56,81	4	I	-57,14	-I	III
9. DKI Jakarta	-55,71	-2	III	14,31	2	I	97,40	2	II
10. Jawa Barat	-57,63	-5	III	14,76	12	I	66,48	4	II
11. Jawa Tengah	-37,35	-4	II	13,92	9	I	16,43	2	III
12. DI Yogyakarta	-41,33	..	III	17,35	1	I	-5,32	..	II
13. Jawa Timur	-47,50	-8	II	27,91	14	I	23,65	1	III
14. Kalimantan Barat	-29,13	..	II	-3,68	..	I	104,52	..	III
15. Kalimantan Tengah	-53,02	..	II	7,46	..	I	116,77	..	III
16. Kalimantan Selatan	-42,72	-2	II	24,21	1	I	235,69	1	III
17. Kalimantan Timur	-43,72	-1	II	13,78	..	I	79,94	1	III
18. Sulawesi Utara	-23,35	-1	III	0,49	..	I	18,89	I	II
19. Sulawesi Tengah	-26,95	..	II	2,63	..	I	64,20	..	III
20. Sulawesi Tenggara	-27,02	..	II	0,25	..	I	90,48	..	III
21. Sulawesi Selatan	-14,48	..	II	1,01	..	I	99,02	..	III
22. Bali	-16,01	..	III	-0,77	..	I	10,19	..	II
23. NTB	-64,61	-1	II	22,79	2	I	80,18	..	III
24. NTT	1,07	..	III	-1,85	-1	I	75,19	1	II
25. Maluku	-34,84	..	II	9,63	..	I	-11,00	..	III
26. Irian Jaya	-16,81	..	III	0,63	..	I	-1,23	..	II
27. Timor Timur	277,54	..	III	-6,73	..	I	1.816,45	..	II
Nasional	-48,58	-33	II	15,67	53	I	43,30	16	III

Catatan: A. Persentase Kemenangan Riil
B. Pertambahan Kursi DPR
C. Nomor Urut Perolehan Suara.

sebagai partai terbesar No. 2 setelah Golkar dan di atas PPP. Misalnya untuk daerah pemilihan Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Sulawesi Utara, PDI yang pada Pemilihan Umum tahun 1982 menempati kedudukan No. 3 dalam perolehan suara, pada Pemilihan Umum 1987 telah naik dan berada di urutan ke-2 (perhatikan pula Tabel No. 4).

Gambaran pertama yang terlihat dalam Tabel 5 adalah bahwa telah terjadi pergeseran suara pemilih di hampir semua daerah pemilihan. Hal ini tampak dalam perhitungan suara, di mana PPP mengalami kekalahan di 24 propinsi, sedangkan Golkar dan PDI memperlihatkan suatu pola kenaikan dan penurunan di beberapa daerah pemilihan. Bahkan di daerah-daerah yang selama ini menjadi ladangnya, PPP juga mengalami kekalahan yang relatif besar, misalnya di DI Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa

Tabel 5

PERGESERAN SUARA PEMILIH MENURUT DAERAH PEMILIHAN

OPP	Peningkatan menyolok (kemenangan riil lebih dari dua kali peningkatan yang diharapkan)	Peningkatan (peningkatan lebih dari peningkatan yang diharapkan)	Penurunan (peningkatan kurang dari peningkatan yang diharapkan)	Kekalahan (jumlah suara tahun 1987 lebih sedikit daripada jumlah suara tahun 1982)
	(a)	(b)	(c)	(d)
PPP	Timor Timur	NTT	Irian Jaya	DI Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Bali, NTB.
	1 Propinsi	1 Propinsi	1 Propinsi	24 Propinsi
Golkar	DI Aceh, Lampung, Jatim	Sumbar, Sumsel, Jateng, DI Yogyakarta, Kalsel, NTB	Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sultra, Bali, NTT, Maluku, Irija, Timor Timur	
	3 Propinsi	6 Propinsi	18 Propinsi	-
PDI	Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sultra, Sulsel, NTB, NTT, Timor Timur	DI Aceh, Sulut	DI Yogyakarta, Bali, Maluku, Irija	Lampung
	20 Propinsi	2 Propinsi	4 Propinsi	1 Propinsi

Catatan: Tabel 5 ini disusun berdasarkan Lampran II-IV.

Barat, dan Jawa Timur. Di Timor Timur dan di Nusa Tenggara Timur, PPP memang mengalami peningkatan menyolok dan peningkatan biasa, tetapi peningkatan itu hampir tidak ada artinya karena jumlahnya terlalu kecil dan tidak mengubah perolehan kursi DPR-nya dari dua daerah tersebut (lihat juga Tabel 6). Dalam Pemilihan Umum 1987 Golkar memenangkan secara mayoritas mutlak (lebih dari separuh jumlah suara sah) di semua daerah pemilihan. Golkar mengalami peningkatan menyolok di 3 (tiga) propinsi (kolom a) dan peningkatan di 20 propinsi (kolom b). Sementara itu PDI mengalami kenaikan menyolok di 18 propinsi (kolom a) dan mengalami peningkatan di 5 (lima) propinsi. Tabel 5 itu menunjukkan pula bahwa ketiga kontestan mengalami penurunan di beberapa daerah pemilihan, PPP di Irian Jaya, Golkar di Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur, sedangkan PDI di DI Yogyakarta, Maluku dan Irian Jaya.

Dalam Tabel 5 itu ditunjukkan bahwa kekalahan suara yang diderita oleh PPP diserap oleh Golkar dan PDI sedangkan kekalahan yang diderita oleh PDI tampaknya diserap oleh Golkar. Tabel 5 itu menunjukkan juga bahwa Pemilihan Umum 1987 ini seolah-olah merupakan pertandingan antara PPP dan PDI untuk memperebutkan "Juara II," karena memperebutkan "Juara I" yang telah tiga kali direbut oleh Golkar tampaknya masih terlalu sukar. Hal ini tergambar dalam kolom d PPP dan kolom a PDI, di mana PPP mengalami kekalahan justru di situlah PDI mengalami peningkatan yang menyolok. Akan tetapi kekalahan PPP dan kemenangan menyolok PDI belum dapat dijadikan kepastian bahwa pemilih PPP menyeberang ke PDI. Di sini juga dapat dipertanyakan mungkinkah suara yang didapat PDI itu justru hanya berasal dari para pemilih baru, ataukah mungkin sekali merupakan penyeberangan dari Golkar, dan justru pemilih PPP menyeberang ke Golkar. Hal ini memerlukan penelitian yang lebih cermat. Meskipun PPP mengalami kemunduran, ia masih berada di atas PDI, baik dalam jumlah suara maupun kursi di DPR (lihat pula Tabel 4 dan Lampiran V).

Pergeseran pembagian kursi DPR yang tergambar dalam Tabel 6 dan 6a menunjukkan kecenderungan beberapa hal sehubungan dengan pergeseran jumlah suara yang telah tergambar dalam Tabel 5: (1) 16 daerah pemilihan mengalami pergeseran kursi DPR; (2) di 24 propinsi di mana PPP mengalami kekalahan (lihat Tabel 5 kolom d), di 14 propinsi di antaranya PPP benar-benar mengalami pengurangan sebanyak 33 kursi DPR; (3) di 23 propinsi di mana PDI mengalami peningkatan, 11 propinsi di antaranya membuahkan hasil peningkatan 17 kursi DPR. Demikian halnya dengan Golkar, tiga propinsi di mana Golkar mengalami peningkatan menyolok dan 10 di antara propinsi di mana Golkar mengalami peningkatan ternyata telah membuahkan pertambahan 54 kursi untuknya.³

³Di daerah pemilihan Sumatra Utara meskipun peningkatan suara kurang dari yang diharapkan, Golkar masih mendapat tambahan kursi juga.

Tabel 6

PEMBAGIAN KURSI DPR UNTUK PPP, GOLKAR, PDI

PEMBAGIAN KURSI DPR		1982	1987		
PPP		94	61		
Golkar		246	299		
PDI		24	40		
PERGESERAN KURSI DPR TIAP-TIAP PROPINSI (DAERAH PEMILIHAN)					
Pertambahan		Tetap		Pengurangan	
PPP			Jambi	DI Aceh	(2 kursi)
			Bengkulu	Sumut	(1 kursi)
			DI Yogya	Sumbar	(2 kursi)
			Kalbar	Riau	(1 kursi)
			Kalteng	Sumsel	(2 kursi)
			Sulteng	Lampung	(1 kursi)
			Sultra	DKI Jaya	(2 kursi)
			Sulsel	Jabar	(5 kursi)
			Bali	Jateng	(4 kursi)
			NTT	Jatim	(8 kursi)
			Maluku	Kalsel	(2 kursi)
			Irja	Kaltim	(1 kursi)
			Timtim	Sulut	(1 kursi)
				NTB	(1 kursi)
			13 Propinsi	14 Propinsi	(33 kursi)
Golkar	DI Aceh	(1 kursi)	Jambi	NTT	(1 kursi)
	Sumut	(1 kursi)	Bengkulu		
	Sumbar	(2 kursi)	Kalbar		
	Riau	(2 kursi)	Kalteng		
	Sumsel	(3 kursi)	Kaltim		
	Lampung	(4 kursi)	Sulut		
	DKI Jaya	(2 kursi)	Sulteng		
	Jabar	(12 kursi)	Sultra		
	Jateng	(9 kursi)	Sulsel		
	DI Yogya	(1 kursi)	Bali		
	Jatim	(14 kursi)	Maluku		
	Kalsel	(1 kursi)	Irja		
	NTB	(2 kursi)	Timtim		
	13 Propinsi	(54 kursi)	13 Propinsi	1 Propinsi	(1 kursi)
PDI	DI Aceh	(1 kursi)	Sumbar	Lampung	(1 kursi)
	Sumut	(2 kursi)	Riau		
	Sumsel	(1 kursi)	Jambi		
	DKI Jaya	(2 kursi)	Bengkulu		
	Jabar	(4 kursi)	DI Yogya		
	Jateng	(2 kursi)	Kalbar		
	Jatim	(1 kursi)	Kalteng		
	Kalsel	(1 kursi)	Sulteng		
	Kaltim	(1 kursi)	Sultra		
	Sulut	(1 kursi)	Sulsel		
	NTT	(1 kursi)	Bali		
			NTB		
			Maluu		
			Irja		
			Timtim		
	11 Propinsi	(17 kursi)	15 Propinsi	1 Propinsi	(1 kursi)

Tabel 6a

**PERTAMBAHAN ATAU PENURUNAN KURSI DPR
YANG DIPEROLEH OLEH SETIAP OPP
DALAM PEMILIHAN UMUM 1982 DAN 1987**

No. Daerah Pemilihan	Kursi yang dipersebutkan dalam Pemilu				1982				1987				Perubahan			
	1982	1987	Kenaikan		PPP	Golkar	PDI		PPP	Golkar	PDI		PPP	Golkar	PDI	
1. DI Aceh	10	10	0	0	6	4	0	0	4	5	1	-2	+1	+1	+1	
2. Sumut	19	21	2	2	4	14	1	1	4	15*	3	-1	+1	+1	+2	
3. Sumbang	14	14	0	0	5	9	0	0	3	11*	0	-2	+2	+2	..	
4. Riau	6	7	1	1	2	4	0	0	1	6*	0	-1	+2	+2	..	
5. Sumsel	11	13	2	2	4	6	1	1	2	9*	2	-2	+3	+3	1	
6. Jambi	6	6	0	0	1	5	0	0	1	5*	0	
7. Bengkulu	4	4	0	0	1	3	0	0	1	3*	0	
8. Lampung	8	10	2	2	2	5	1	1	1	9*	0	-1	+4	+4	-1	
9. DKI Jaya	13	15	2	2	5	6	2	2	3	8*	4	-2	+2	+2	+2	
10. Jabar	50	61	11	11	13	32	5	5	8	44*	9	-3	+12	+12	+4	
11. Jateng	51	58	7	7	14	31	6	6	10	40*	8	-4	+9	+9	+2	
12. DI Yogya	6	7	1	1	1	4	1	1	1	5*	1	..	+1	+1	..	
13. Jatiim	57	64	7	7	21	32	4	4	13	46*	5	-8	+14	+14	+1	
14. Kalbar	7	7	0	0	1	5	1	1	1	5*	1	
15. Kalteng	6	6	0	0	1	5	0	0	1	5*	0	
16. Kalsel	10	10	0	0	4	6	0	0	2	7*	1	-2	+1	+1	+1	
17. Kalim	6	6	0	0	2	4	0	0	1	4*	1	-1	+1	
18. Sulut	6	6	0	0	1	5	0	0	0	5*	1	-1	+1	
19. Sulteng	4	4	0	0	1	3	0	0	1	3*	0	
20. Sulira	4	4	0	0	0	4	0	0	0	4*	0	
21. Sulsel	23	23	0	0	2	21	0	0	2	21*	0	
22. Bali	8	8	0	0	0	7	1	1	0	7*	1	
23. NTB	6	7	1	1	2	4	0	0	1	6*	0	-1	+2	+2	..	
24. NTT	12	12	0	0	0	12	0	0	0	11*	1	..	-1	-1	+1	
25. Maluku	4	4	0	0	1	3	0	0	1	3*	0	
26. Irian Jaya	9	9	0	0	0	8	1	1	0	8*	1	
27. Timtim	4	4	0	0	0	4	0	0	0	4*	0	
Jumlah	364	400	36	36	94	246	24	24	61	299	40	-33	+54-1	+53	+16	

Keterangan: + Kenaikan (pertambahan)

- Penurunan

.. Tetap (tidak ada perubahan)

* Golkar memenangkan mayoritas mutlak.

Dua daerah lain yakni NTT dan Lampung kiranya juga semakin menegaskan kecenderungan hal-hal yang tertera dalam Tabel 5. Di daerah pemilihan NTT di mana Golkar mengalami penurunan (kolom c) ternyata dia kehilangan satu kursi, dan di daerah pemilihan Lampung di mana PDI mengalami kekalahan (kolom d) dia kehilangan satu kursi pula. Terjadinya pergeseran perolehan kursi DPR itu disebabkan antara lain oleh kenaikan jumlah kursi DPR yang diperebutkan di 10 daerah pemilihan. Indikasi ini tampaknya juga diperkuat oleh kenyataan bahwa 11 di antara 17 daerah pemilihan yang tidak mengalami kenaikan kursi yang diperebutkan ternyata tidak terjadi pergeseran jumlah kursi yang diperoleh setiap kontestan. Di samping itu keadaan intern masing-masing kontestan tampaknya juga ikut mempengaruhi terjadinya pergeseran perolehan kursi DPR untuk tahun 1987. Hal ini juga menegaskan bahwa tingkah-laku pemilih di Indonesia tidak menunjukkan pola memilih yang konsisten.

Tabel 6a menunjukkan bahwa Golkar memenangkan mayoritas mutlak⁴ kursi di 26 daerah pemilihan. Hanya di Daerah Istimewa Aceh gabungan kursi PPP dan PDI dapat menyamai Golkar ($4 + 1 = 5$). Tetapi hal itu juga menunjukkan kekalahan yang dialami PPP, dari 6 kursi menjadi 4 kursi, serta peningkatan PDI, dari tanpa kursi mendapat 1 kursi DPR. Di DKI Jakarta, PDI telah berhasil menggeser PPP, meskipun kursinya masih kalah dari Golkar. Tabel itu juga menunjukkan bahwa jumlah kenaikan kursi yang diperebutkan dalam pemilihan umum (36 kursi) dan penurunan kursi yang diderita oleh PPP (33 kursi) telah diambil-alih oleh Golkar (53 kursi) dan PDI (16 kursi).

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan umum di Indonesia adalah perbedaan yang sudah lama dikenal, yaitu antara Jawa dan Luar Jawa serta peranan yang dimainkan oleh perbedaan itu dalam politik pemilihan dewasa ini. Dalam Pemilihan Umum 1955 sistem perwakilan proporsional yang kaku tidak memungkinkan diakuinya pembedaan semacam itu. Sejak Pemilihan Umum 1971 suatu sistem pemilihan campuran dipergunakan sebagai upaya menyeimbangkan sistem lama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu dari sistem distrik. Indonesia dibagi dalam dua distrik besar, Jawa dan Luar Jawa. Untuk Pemilihan Umum 1987 masing-masing mendapat 205 dan 195 kursi DPR. Pembagian ini merupakan suatu usaha mempertemukan ketidaksesuaian yang menyolok antara luas wilayah Jawa-Madura yang hanya 6,94% dari seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 61% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Kedua distrik besar itu kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa daerah pemilihan (propinsi) yang dijamin mendapat sejumlah kursi minimum sebanyak jumlah kabupaten dalam setiap propinsi, dan sisa kursi dibagikan kepada propinsi-propinsi ber-

⁴Mayoritas mutlak adalah kemenangan yang mencapai lebih separuh jumlah kursi yang diperebutkan. Di Daerah Istimewa Aceh peningkatan kursi Golkar diperoleh antara lain oleh stembus accori.

dasarkan jumlah penduduk. Hal ini tentu saja menimbulkan situasi bahwa suara dari Jawa yang lebih padat penduduknya kurang berperanan daripada suara dari Luar Jawa. Akan tetapi keadaan seperti ini kiranya lebih baik dan lebih luwes daripada keadaan tahun 1955, meskipun beberapa pihak dewasa ini menginginkan agar sistem semacam ini ditinjau kembali. Tabel 7 di bawah ini menunjukkan hubungan antara jumlah suara dan jumlah kursi DPR yang diperoleh sehubungan dengan dikhotomi antara Jawa dan Luar Jawa dalam tahun 1987.

Meskipun ketiga kontestan mendapatkan mayoritas pendukungnya di Jawa, Golkar dapat mendekati distribusi dukungan suara dengan distribusi aktual dari penduduk antara Jawa dan Luar Jawa. Perbedaan dalam bobot suara ini dengan jelas diperlihatkan oleh kenyataan bahwa Golkar menerima lebih dari 50% suaranya di Jawa, tetapi lebih dari 50% kursi DPR yang diperolehnya berasal dari Luar Jawa. Konsentrasi yang lebih besar, baik dari PPP maupun PDI pada dukungan di Jawa diperlihatkan tidak hanya oleh persentase yang lebih besar dari jumlah suara yang mereka kumpulkan di sana, tetapi juga oleh kenyataan bahwa mayoritas kursi DPR mereka adalah dari daerah-daerah pemilihan Jawa.

Namun demikian bila Tabel 7 ini dibandingkan dengan Tabel 7 a (hasil-hasil Pemilu 1982) dan 7b (hasil-hasil Pemilu 1977), kelihatan terjadi pergeser-

Tabel 7

HASIL PEMILIHAN UMUM 1987 JAWA: LUAR JAWA

	Suara		Kursi	
	Jawa	Luar Jawa	Jawa	Luar Jawa
PPP	9.446.812 (68,948%)	4.254.616 (31,052%)	35 (57,38%)	26 (42,62%)
Golkar	36.420.907 (58,01%)	26.362.773 (41,90%)	143 (47,83%)	156 (52,17%)
PDI	7.050.167 (75,61%)	2.274.541 (24,39%)	27 (67,50%)	13 (32,50%)

Tabel 7a

HASIL PEMILIHAN UMUM 1987 JAWA: LUAR JAWA

	Suara		Kursi	
	Jawa	Luar Jawa	Jawa	Luar Jawa
PPP	14.665.680 (70,27%)	6.206.200 (29,73%)	54 (57,45%)	40 (42,55%)
Golkar	27.750.344 (57,41%)	20.584.380 (42,59%)	105 (42,68%)	141 (57,32%)
PDI	4.612.762 (77,92%)	1.306.940 (22,08%)	18 (75%)	6 (25%)

Tabel 7b

HASIL PEMILIHAN UMUM 1987 JAWA: LUAR JAWA

	Suara		Kursi	
	Jawa	Luar Jawa	Jawa	Luar Jawa
PPP	13.116.353 (70,24%)	5.627.138 (29,76%)	56 (56,56%)	43 (43,44%)
Golkar	23.921.672 (60,18%)	15.828.424 (39,82%)	104 (44,82%)	128 (55,18%)
PDI	4.138.514 (75,18%)	1.366.243 (24,82%)	19 (65,52%)	10 (34,48%)

Tabel 8

MPR	Dipilih dalam Pemilu	Dipilih oleh DPRD I	Diangkat	Dipilih berdasarkan imbang-an hasil Pemilu	Diangkat berda-sarkan imbang-an hasil Pemilu
1. Anggota DPR dari peserta Pemilu	400				
2. Anggota DPR dari ABRI			100		
3. Utusan Golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945			100		
4. Utusan Daerah		147			
5. Utusan Organisasi peserta Pemilu				202	
6. Utusan Golongan Karya ABRI					51

Catatan: Berdasarkan imbang-an hasil pemillhan umum, Golkar mendapat tambahan anggota MPR sebanyak:

$$\frac{299}{500} \times 253 = 151 \text{ orang;}$$

$$\text{PPP sebanyak: } \frac{61}{500} \times 253 = 31 \text{ orang;}$$

$$\text{PDI sebanyak: } \frac{40}{500} \times 253 = 20 \text{ orang;}$$

$$\text{Atas dasar ini ABRI juga mendapat tambahan anggota MPR sebanyak: } \frac{100}{500} \times 253 = 51 \text{ orang.}$$

an-pergeseran. Persentase kursi untuk PPP, Golkar dan PDI antara Jawa dan Luar Jawa sejak tahun 1977 menunjukkan suatu pergeseran yang patut dicatat untuk mengetahui apakah kecenderungan yang demikian akan semakin nyata dalam masa-masa mendatang. Untuk PPP terdapat kecenderungan tetap antara Jawa dan Luar Jawa. Untuk Golkar terjadi turun-naik sebagai berikut: turun 2,14% dan naik 5,24%, sedangkan untuk PDI sebaliknya, terjadi naik-turun sebagai berikut: naik 9,48% dan turun 7,50%.

Sementara itu distribusi kursi DPR untuk PPP menunjukkan kecende-rungan terus menurun, baik untuk Jawa maupun Luar Jawa (56-54-35 dan

43-40-26). Golkar terus naik: 104-105-143 dan 128-141-156; sedangkan PDI turun-naik sebagai berikut: 19-18-27 dan 10-6-13. Meskipun terjadi peningkatan kursi dan suara yang diperoleh PDI di Luar Jawa, tampaknya partai ini belum dapat mengubah image di masyarakat, bahwa PDI adalah partai orang Jawa.

Kemudian dalam Tabel 8 kita jumpai pergeseran jumlah kursi MPR yang dipilih dan diangkat untuk masa bhakti 1987-1992. Yang dipilih mencapai jumlah: $400 + 47 + 202 = 749$ anggota atau 74,90%. Yang diangkat adalah: $100 + 100 + 51 = 251$ anggota atau 25,10%. Ini berarti jumlah anggota MPR yang dipilih meningkat, sedangkan yang diangkat menurun, bila dibandingkan dengan tahun 1982. Untuk periode 1982-1987, MPR yang dipilih 617 orang dan yang diangkat 303 orang.

BEBERAPA FAKTOR PENGARUH

Pembagian kursi DPR hasil Pemilu 1987 adalah PPP: 61 kursi (15,25%), Golkar: 299 kursi (74,75%) dan PDI: 40 kursi (10%). Perolehan kursi itu bila dibandingkan dengan hasil Pemilu 1982 menunjukkan bahwa PPP mengalami kemunduran, dari 94 menjadi 61 kursi DPR, turun 33 kursi atau sekitar 35,11%; Golkar mengalami peningkatan dari 246 menjadi 299 kursi DPR, naik 53 kursi atau sekitar 21,54%; dan PDI demikian juga, mengalami peningkatan dari 24 menjadi 40 kursi DPR, naik 16 kursi atau 4,0%.⁵

Beberapa faktor mempengaruhi kemunduran perolehan kursi PPP, seperti (1) penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi semua kekuatan sosial-politik, sehingga PPP tidak lagi mengklaim dirinya sebagai Partai Islam di Indonesia; (2) pertentangan intern (dalam tubuh) PPP itu sendiri; dan (3) yang masih erat hubungannya dengan pertentangan intern PPP adalah kembalinya NU ke chitah 1926 yang menimbulkan terjadinya penggemosan di dalam tubuh PPP.⁶

Faktor yang pertama mungkin dapat dijadikan alasan kemunduran PPP. Hal ini didasarkan pada posisi PPP di daerah-daerah pemilihan yang sejak tahun 1971 dapat dikatakan sebagai basis partai-partai Islam di Indonesia, yakni Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan dan Kalimantan Selatan. Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tampaknya telah menjadi hambatan bagi PPP untuk sekali lagi mempergunakan pola-pola lama, khususnya ciri keagamaan, di dalam kampanyenya, meskipun sisa-sisa pola lama ini di sana-sini masih terdengar. Akibatnya mayoritas pendukungnya yang beragama

⁵Persentase di sini adalah persentase kursi, yang dihitung berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh dibagi jumlah kursi yang diperebutkan kali 100%, berbeda dengan persentase suara.

⁶Lihat juga uraian Tommi Legowo, M. Djadjiono dan Wiratmo Prawiroyudho dalam nomor ini juga tentang masalah-masalah ini.

Islam secara emosional tidak lagi tersentuh oleh himbuan para juru kampanye PPP.

Tetapi sebaliknya kita juga dapat mengatakan bahwa sebenarnya dengan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas itu semestinya dapat meningkatkan suara maupun kursi yang diperoleh PPP. Orang dapat berkata bahwa PPP, Golkar dan PDI sama saja karena semuanya telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas sehingga pemilih-pemilih yang selama ini dihantui ketakutan untuk memilih PPP karena PPP dianggap bukan partai yang berasaskan Pancasila dapat dengan tenang memilih PPP. Atas dasar ini, faktor pertama ini kiranya bukan menjadi alasan penting kemunduran PPP. Para pendukung/pemilih PPP dari lapisan bawah pun kiranya juga tidak terpengaruh oleh penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas, karena penerimaan ini pun masih dalam taraf awal, dan kiranya masih memerlukan waktu lebih lama untuk sampai ke lapisan masyarakat paling bawah.

Pertentangan intern mungkin paling banyak mempengaruhi kemunduran PPP, sehingga ia terlambat memasuki Pemilihan Umum 1987. Energi PPP habis sebelum bertanding. Hal ini tampak dari kemunduran PPP di daerah-daerah pemilihan Jawa yang dekat dengan Jakarta (tempat DPP PPP), dari 54 kursi menjadi 35 kursi, menurun 19 kursi atau sekitar 35,19%.

PPP tampaknya masih terus bergelut mengatasi kemelut dalam dirinya sampai pemilihan umum memasuki fase-fase yang menentukan. Bahkan sampai pada pencalonan anggota DPR pun, dalam DPP PPP masih terjadi silang pendapat. Dari situasi kemelut yang dialami PPP ini, kita dapat menarik suatu kesimpulan awal bahwa fusi di dalam PPP tampaknya belum tuntas. Unsur-unsur yang dahulu membentuk PPP kiranya belum bersedia mengorbankan kepentingan dirinya demi kemajuan PPP secara keseluruhan, maupun perkembangan kepartaian di Indonesia pada umumnya.

Kembalinya NU ke chitah 1926 yang kemudian dilanjutkan dengan pengembosan banyak pula dikatakan sebagai faktor semakin mundurnya PPP dalam Pemilihan Umum 1987. Dilontarkannya pernyataan pemimpin-pemimpin NU, khususnya Abdurrahman Wahid, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah Munas NU Situbondo tahun 1984, NU tidak terikat lagi pada suatu partai dan setiap anggota NU boleh memilih partai mana pun yang disenanginya, kiranya telah pula semakin menggoncangkan para pemilih/pendukung PPP dari unsur NU.⁷ Ini mungkin menjadi faktor kemunduran PPP di daerah pemilihan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Namun demikian PPP masih berhasil memperoleh kursi yang memadai justru di daerah pemilihan Pulau Jawa. Ini menandakan bahwa PPP masih mempunyai pendukung yang dapat dijadikan modal untuk memasuki pemilihan umum di masa-masa mendatang.

⁷NU di samping Parmusi merupakan dua partai pendukung utama PPP, terutama di Jawa.

Sementara itu, selain kelemahan-kelemahan yang diderita oleh PPP menjadi faktor yang menguntungkan dirinya, Golongan Karya berhasil memanfaatkan jaringan organisasinya, baik formal maupun non-formal, secara baik. Di samping itu Golkar masih mampu memanfaatkan pola memilih sebagian besar rakyat Indonesia yang berada di pedesaan dan pola bapak panutan untuk Pemilihan Umum 1987 ini.

Dalam Pemilihan Umum 1987 itu Golkar berhasil mengklaim bahwa dirinya adalah partai yang memerintah sekarang ini. Golkar berani mengklaim bahwa pembangunan yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru itu, merupakan hasil jerih payah Golkar. Dalam kaitan ini ternyata Golkar mampu memanfaatkan pemimpin-pemimpin pemerintahan, termasuk para menteri, menjadi fungsionaris Golkar yang dijadikan salah satu ujung tombak dalam kampanye. Hal ini mungkin menimbulkan pandangan atau sikap para pemimpin di beberapa daerah untuk meminta rakyatnya memilih Golkar agar pembangunan di daerah itu tetap berjalan. Mungkin daerah Aceh dan Sumatra Barat dapat dijadikan contoh.

Berkaitan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan sarana-sarana keagamaan, seperti pembangunan mesjid, mushola, bantuan kepada pesantren-pesantren dan lain-lain, Golkar berani mengklaimnya sehingga di mata beberapa kalangan Golkar dipandang lebih Islam daripada PPP.⁸ Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor Golkar dapat menyerap para pemilih yang lari dari PPP.

Sebagian besar pemilih Indonesia adalah masyarakat pedesaan, yang masih tradisional dan pola memilihnya belum banyak berubah dari pola tradisional berdasarkan bapak panutan, sehingga banyak terpengaruh oleh anjuran, permintaan ataupun pilihan para pemimpinnya, terutama pemimpin formalnya. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan pejabat pemerintah kita sekarang ini adalah anggota/pendukung Golkar. Oleh karena itu telah dapat diramalkan sebelumnya bahwa Golkar masih akan memenangkan Pemilihan Umum 1987 ini.

Memang pemanfaatan bapak panutan ini telah memberikan keuntungan bagi kemenangan Golkar, tetapi membawa akibat timbulnya kesan bahwa Golkar kurang mempunyai atau sekurang-kurangnya tidak dapat memunculkan generasi-generasi muda atau kader-kader mudanya dalam kampanye yang lalu. Ini memperkuat kesan di masyarakat bahwa Golkar adalah partainya orang tua. Kesan semacam ini kurang menguntungkan kedudukan Golkar untuk masa-masa yang akan datang.

Mengenai PDI, selain keberhasilannya membawakan diri sebagai partai

⁸Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Barat, Drs. H. Ubaidillah Muchtar, sampai tanggal 10 April 1987 di Jawa Barat terdapat 36.016 buah mesjid, 91.678 langgar dan 14.065 buah mushola.

orang muda dan partai masa depan, dia terutama mendapat keuntungan dari adanya *protes votes* (''bola muntah'') khususnya di kota-kota besar yang lebih tinggi kesadaran politiknya karena mendapat pendidikan lebih tinggi dari saudara-saudaranya di pedesaan. Hal ini sedikit banyak tampak dalam keberhasilannya mengumpulkan orang-orang muda dalam setiap kampanye yang dilakukannya, terutama pada putaran kampanye terakhir tanggal 17 April 1987.

Namun apakah PDI berhasil menarik generasi muda Indonesia untuk memilihnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Tetapi terdapat petunjuk, yakni hasil survei yang dilakukan oleh *Tempo*, untuk nomornya tanggal 2 Agustus 1986 dan harian *Kompas* tanggal 25 Januari 1987 bahwa generasi muda Indonesia rupa-rupanya masih tetap mendukung Golkar dalam Pemilihan Umum 1987 ini seperti ternyata dari survei TPS-TPS di SMA-SMA se-Jakarta. Tetapi di kota-kota besar di Jawa generasi muda banyak yang berpartisipasi dalam kampanye-kampanye PDI, terutama kampanye tanggal 17 April 1987. Karena efek kampanye itu, suara yang diperoleh PDI di daerah pemilihan DKI Jakarta meningkat, sehingga berhasil menjadi pemenang kedua setelah Golkar dan dengan demikian menggeser kedudukan PPP di ibukota Jakarta. Suaranya dari sekitar 12% di tahun 1982 naik menjadi sekitar 29%, sedangkan PPP dari 39% turun menjadi sekitar 21%.

Kemungkinan besar banyak di antara generasi muda yang turut kampanye PDI itu hanya ikut-ikutan tetapi akhirnya suaranya tetap diberikan kepada Golkar. Banyak di antara mereka itu masih terlalu muda untuk mempunyai hak memilih. Tetapi harus diakui bahwa dalam kampanye-kampanye di kota-kota besar terutama di Jawa, PDI tampak berhasil menyalurkan dukungan generasi muda dan mereka yang ingin melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat, terutama dalam soal-soal hak politik, kesenjangan pendapat atau soal keadilan dan pengangguran. Hal ini terutama terlihat dari tema yang menarik perhatian dalam kampanye-kampanye PDI tersebut.

PENUTUP

Kesan pertama yang segera dapat dilihat dari hasil Pemilihan Umum tanggal 23 April 1987 yang baru lalu adalah terjadinya pergeseran dalam perolehan suara maupun perolehan kursi DPR. Hal ini dapat dikatakan sebagai gejala adanya dinamika di dalam masyarakat. Dalam batas-batas tertentu masyarakat telah berusaha menerobos ikatan-ikatan primordial yang selama ini dianggapnya sebagai suatu penghalang tercapainya perubahan-perubahan sosial yang diperlukan untuk kemajuan bangsa.

Selanjutnya dengan mendasarkan diri pada tercapainya ketenangan dan ketertiban selama berlangsungnya pemilihan umum, termasuk masa kam-

panye, serta besarnya partisipasi rakyat dalam pemilihan umum bangsa Indonesia berhasil dengan baik melaksanakan Pemilihan Umum yang ke-4 dalam masa Orde Baru ini. Keberhasilan ini merupakan gejala semakin meningkatnya kedewasaan politik rakyat Indonesia. Kita akui di beberapa daerah masih terdapat kesalahan dan pelanggaran, tetapi perhatian yang terus-menerus akan mencegah terulangnya pelanggaran-pelanggaran itu.

Ketiga Organisasi Peserta Pemilihan Umum, PPP, Golkar dan PDI, telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti pertentangan-pertentangan ideologi yang selama ini sering menghalangi tercapainya persatuan bangsa tidak mempunyai wadah lagi. Dengan terkikisnya pertentangan-pertentangan ideologi itu, untuk masa-masa mendatang partai-partai politik dan Golkar akan dapat lebih memusatkan orientasinya pada program dan dapat semakin menunjukkan dirinya sebagai partai terbuka.

Lampiran I

PENILAIAN ATAS HASIL SUARA TERPERINCI PER DAERAH

No. Daerah Pemilihan	Jumlah Suara		Tambah Suara	Persentase Tambah Suara
	1982	1987		
1. DI Aceh	1.308.089	1.537.613	229.524	17,55
2. Sumatra Utara	3.919.563	4.500.345	580.782	14,82
3. Sumatra Barat	1.588.410	1.912.869	324.459	20,43
4. Riau	1.072.881	1.353.307	280.426	26,14
5. Sumatra Selatan	2.226.119	2.699.266	473.147	21,25
6. Jambi	762.517	910.638	148.121	19,43
7. Bengkulu	363.196	502.667	139.471	38,40
8. Lampung	2.204.059	2.685.883	481.824	21,86
9. DKI Jakarta Raya	3.236.804	3.975.152	738.348	22,81
10. Jawa Barat	13.572.006	15.911.962	2.339.956	17,24
11. Jawa Tengah	13.130.290	14.284.597	1.154.307	8,79
12. DI Yogyakarta	1.442.181	1.572.111	129.930	9,01
13. Jawa Timur	15.647.405	17.174.064	1.526.659	9,76
14. Kalimantan Barat	1.257.593	1.451.606	194.013	15,43
15. Kalimantan Tengah	525.024	664.873	139.849	26,64
16. Kalimantan Selatan	1.075.715	1.228.102	152.387	14,17
17. Kalimantan Timur	575.444	746.005	170.561	29,64
18. Sulawesi Utara	1.124.212	1.312.877	188.665	16,78
19. Sulawesi Tengah	672.190	787.670	115.480	17,18
20. Sulawesi Tenggara	498.841	600.517	101.676	20,38
21. Sulawesi Selatan	3.105.669	3.387.439	281.770	9,07
22. Bali	1.361.754	1.525.896	164.142	12,05
23. Nusa Tenggara Barat	1.319.502	1.475.290	155.788	11,81
24. Nusa Tenggara Timur	1.472.960	1.629.216	156.256	10,61
25. Maluku	709.796	825.124	115.326	16,25
26. Irian Jaya	642.759	793.827	151.068	23,50
27. Timor Timur	311.325	360.900	49.575	15,575
Nasional	75.126.306	85.809.816	10.688.519	14,22

Lampiran II

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. Daerah Pemilihan	Hasil Pemilihan Umum		Kemajuan Nominal		Kemajuan Yang Diharapkan		Kemajuan atau Kemenangan Riil	
	1982	1987	Suara	%	Suara	%	Suara	%
1. DI Aceh	772.819	660.664	-112.175	-14,52	135.603	17,55	-247.778	-32,06
2. Sumatra Utara	801.296	606.617	-194.679	-24,30	118.732	14,82	-313.411	-39,11
3. Sumatra Barat	615.789	375.529	-240.260	-39,02	125.785	20,43	-366.045	-59,44
4. Riau	276.678	203.555	-73.123	-26,43	72.317	26,14	-145.446	-52,57
5. Sumatra Selatan	847.045	508.006	-30.631	-40,03	180.034	21,25	-519.073	-61,28
6. Jambi	105.337	74.706	-339.039	-29,08	20.462	19,43	-51.093	-48,50
7. Bengkulu	94.959	51.547	-43.412	-45,72	36.465	38,40	-79.877	-84,12
8. Lampung	661.719	196.820	-464.899	-70,26	134.657	21,86	-609.856	-92,12
9. DKI Jakarta	1.268.878	851.456	-417.422	-32,90	289.444	22,81	-706.866	-55,71
10. Jawa Barat	3.678.132	2.197.846	-1.489.286	-40,39	635.700	17,24	-2.124.986	-57,63
11. Jawa Tengah	3.640.383	2.600.746	-1.039.637	-28,56	320.033	8,79	-1.359.676	-37,35
12. DI Yogyakarta	336.664	227.846	-108.818	-37,32	30.331	9,01	-139.149	-41,33
13. Jawa Timur	5.732.623	3.568.918	-2.163.705	-37,74	559.311	9,76	-2.723.016	-47,50
14. Kalimantan Barat	260.722	224.996	-35.726	-13,70	40.222	15,43	-75.948	-29,13
15. Kalimantan Tengah	76.392	56.297	-20.155	-26,38	20.348	26,64	-40.503	-53,02
16. Kalimantan Selatan	426.485	304.716	-121.769	-28,55	60.416	14,17	-182.185	-42,72
17. Kalimantan Timur	183.280	157.474	-25.806	-14,08	54.324	29,64	-80.190	-43,72
18. Sulawesi Utara	76.060	71.004	-4.996	-6,57	12.764	16,78	-17.760	-23,95
19. Sulawesi Tengah	104.343	94.150	-10.193	-9,77	17.926	17,18	-28.119	-26,95
20. Sulawesi Tenggara	12.775	11.927	-848	-6,64	2.604	20,38	-3.452	-27,02
21. Sulawesi Selatan	317.824	300.629	-17.195	-5,41	28.735	9,07	-46.030	-14,48
22. Bali	26.444	25.398	-1.046	-3,96	3.187	12,05	-4.233	-16,01
23. NTB	371.509	175.337	-196.172	-52,80	43.762	11,81	-240.034	-64,61
24. NTT	19.100	21.330	2.230	11,68	2.026	10,61	204	1,07
25. Maluku	134.597	109.570	-25.027	-18,59	21.869	16,25	-46.896	-34,84
26. Irian Jaya	20.354	21.716	1.362	6,69	4.784	23,50	-3.422	-16,81
27. Timor Timur	673	2.648	1.975	243,46	107	15,92	1.868	277,54
Nasional	20.871.880	13.701.428	-7.170.452	-34,35	2.968.134	14,22	-10.138.586	-48,58

Lampiran III

GOLONGAN KARYA

No. Daerah Pemilihan	Hasil Pemilihan Umum		Peningkatan atau Kemajuan Nominal		Peningkatan atau Kemajuan yang Diharapkan		Kemajuan atau Kemenangan Riil	
	1982	1987	Suara	%	Suara	%	Suara	%
1. DI Aceh	483.570	798.983	315.413	65,23	84.850	17,55	230.563	47,68
2. Sumatra Utara	2.843.427	3.274.533	431.106	15,16	421.325	14,82	9.781	0,34
3. Sumatra Barat	959.492	1.504.457	544.965	56,80	195.992	20,43	348.973	36,37
4. Riau	769.131	1.078.942	309.811	40,28	201.033	26,14	108.778	14,14
5. Sumatra Selatan	1.247.287	1.869.635	622.348	25,16	265.103	21,25	357.245	28,64
6. Jambi	646.591	809.299	162.708	49,90	125.602	19,43	37.106	5,74
7. Bengkulu	256.485	426.301	169.816	66,21	98.493	38,40	71.323	27,81
8. Lampung	1.308.274	2.337.563	1.024.289	78,68	285.999	21,86	743.290	56,81
9. DKI Jakarta	1.456.216	1.996.837	540.621	37,13	332.178	22,81	208.443	14,31
10. Jawa Barat	8.596.458	11.347.051	2.750.593	32,06	1.482.119	17,24	1.268.474	14,76
11. Jawa Tengah	7.940.158	9.743.228	1.803.070	22,71	698.033	8,79	1.105.037	13,92
12. DI Yogyakarta	873.260	1.103.429	230.169	26,36	78.674	9,01	151.495	17,35
13. Jawa Timur	8.884.252	12.230.362	3.346.110	37,66	866.803	9,76	2.479.307	27,91

Lampiran III (lanjutan)

14. Kalimantan Barat	892.801	997.707	104.906	11,75	137.735	15,43	-32.829	-3,68
15. Kalimantan Tengah	442.197	592.973	150.776	34,10	117.787	26,64	32.989	7,46
16. Kalimantan Selatan	637.397	881.987	244.590	38,37	90.294	14,17	154.296	24,21
17. Kalimantan Timur	352.746	505.919	153.173	43,42	104.554	29,64	48.619	13,78
18. Sulawesi Utara	979.486	1.148.651	169.165	17,27	164.377	16,78	4.788	0,49
19. Sulawesi Tengah	546.468	654.242	108.274	19,81	93.881	17,18	14.393	2,63
20. Sulawesi Tenggara	483.598	583.386	99.788	20,63	98.569	20,38	1.219	0,25
21. Sulawesi Selatan	2.769.736	3.049.126	279.390	10,09	251.292	9,07	28.098	1,01
22. Bali	1.203.101	1.338.876	135.775	11,29	145.018	12,05	-9.243	-0,77
23. NTB	905.280	1.217.956	312.670	34,54	106.883	11,81	205.787	22,73
24. NTT	1.419.204	1.543.497	124.293	8,76	150.553	10,61	-26.260	-1,85
25. Maluku	534.086	672.281	138.195	25,88	86.777	16,25	51.418	9,63
26. Irian Jaya	594.415	737.887	143.472	24,14	139.706	23,50	3.766	0,63
27. Timor Timur	309.608	338.078	28.470	9,20	49.302	15,92	-20.832	-6,73
Nasional	48.334.724	62.783.680	14.448.956	29,89	6.873.351	14,22	7.575.405	15,67

Lampiran IV

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

No. Daerah Pemilihan	Hasil Pemilihan Umum		Peningkatan atau Kemajuan Nominal		Peningkatan atau Kemajuan yang Diharapkan		Kemajuan atau Kemenangan Riil	
	1982	1987	Suara	%	Suara	%	Suara	%
1. DI Aceh	51.700	77.986	26.286	50,84	9.072	17,55	17.214	33,30
2. Sumatra Utara	274.840	619.195	344.355	125,29	40.724	14,82	303.631	110,48
3. Sumatra Barat	13.129	32.883	19.754	150,46	2.682	20,43	17.072	130,03
4. Riau	27.072	70.810	43.738	161,56	7.076	26,14	36.662	135,42
5. Sumatra Selatan	131.787	321.625	189.838	144,05	28.010	21,25	161.828	122,80
6. Jambi	10.589	26.633	16.044	151,52	2.057	19,43	13.987	132,09
7. Bengkulu	11.752	24.819	13.067	111,19	4.513	38,40	8.554	72,79
8. Lampung	234.066	151.500	-82.566	-35,27	51.169	21,86	-133.735	-57,14
9. DKI Jakarta	511.710	1.126.859	615.149	120,21	116.726	22,81	498.423	97,40
10. Jawa Barat	1.288.416	2.367.065	1.078.649	83,72	222.136	17,24	856.513	66,48
11. Jawa Tengah	1.549.749	1.940.623	390.874	25,22	136.241	8,79	254.633	16,43
12. DI Yogyakarta	232.257	240.836	8.579	3,69	20.925	9,01	-12.346	-5,32
13. Jawa Timur	1.030.530	1.374.784	344.254	33,41	100.545	9,76	243.709	23,65
14. Kalimantan Barat	104.070	228.903	124.833	119,95	16.055	15,43	108.778	104,52
15. Kalimantan Tengah	6.435	15.663	9.228	143,40	1.714	26,64	7.514	116,77
16. Kalimantan Selatan	11.833	41.399	29.566	249,86	1.676	14,17	27.890	235,69
17. Kalimantan Timur	39.418	82.612	43.194	109,58	11.683	29,64	31.511	79,94
18. Sulawesi Utara	68.666	93.162	24.496	35,67	11.524	16,78	12.972	18,89
19. Sulawesi Tengah	21.379	38.778	17.399	81,38	3.673	17,18	13.726	64,20
20. Sulawesi Tenggara	2.468	5.204	2.736	110,86	503	20,38	2.233	90,48
21. Sulawesi Selatan	18.109	37.684	19.575	108,10	1.643	9,07	17.932	99,02
22. Bali	132.209	161.622	29.413	22,25	15.936	12,05	13.477	10,19
23. NTB	42.713	82.003	39.290	91,99	5.043	11,81	34.247	80,18
24. NTT	34.656	64.389	29.733	85,79	3.676	10,61	26.057	75,19
25. Maluku	41.115	43.273	2.158	5,25	6.680	16,25	-4.522	-11,00
26. Irian Jaya	27.990	34.224	6.234	22,27	6.579	23,50	-345	-1,23
27. Timor Timur	1.044	20.174	19.130	1.832,38	166	15,92	18.964	1.816,45
Nasional	5.919.702	9.324.708	3.405.006	57,52	841.825	14,22	2.563.181	43,30

PEMBAGIAN KURSI DPR UNTUK TAHUN 1987
DARI MASING-MASING ORGANISASI DALAM SETIAP DAERAH PEMILIHAN

No.	Daerah Pemilihan	Pemilih yang Terdaftar	Jumlah suara yang diperoleh OPP	Suara yang Diperoleh OPP			Jumlah pembagi pemilihan*	Jumlah kursi DPR yang diperebutkan	Kursi DPR yang diperoleh OPP		
				PPP	Golkar	PDI			PPP	Golkar	PDI
1.	DI Aceh	1.645.982	1.537.613	660.644	798.893	77.986	153.761	10	4	5	1
2.	Sumatra Utara	4.839.765	4.500.345	606.617	3.274.533	619.195	214.304	21	3	15	3
3.	Sumatra Barat	2.061.668	1.912.869	375.529	1.504.457	32.883	136.634	14	3	11	0
4.	Riau	1.444.743	1.353.307	203.555	1.078.942	70.810	193.330	7	1	6	0
5.	Jambi	2.989.835	910.638	74.706	809.299	26.633	151.773	6	1	5	0
6.	Sumatra Selatan	2.989.835	2.699.266	508.006	1.869.635	321.625	125.667	13	2	9	2
7.	Bengkulu	528.823	502.667	51.547	426.301	24.819	125.667	4	1	3	0
8.	Lampung	2.751.223	2.685.883	196.820	2.337.563	151.500	268.588	10	1	9	0
9.	DKI Jaya	4.435.120	3.975.152	851.456	1.996.837	1.126.859	625.010	15	3	8	4
10.	Jawa Barat	17.582.857	15.911.962	2.197.846	11.347.051	2.367.065	260.852	61	8	44	9
11.	Jawa Tengah	16.039.205	14.284.597	2.600.746	9.743.228	1.940.623	246.286	58	10	40	8
12.	DI Yogyakarta	1.776.717	1.572.111	227.846	1.103.429	240.836	224.587	7	1	5	1
13.	Jawa Timur	19.098.967	17.174.064	3.568.918	12.230.362	1.374.784	268.345	64	13	46	5
14.	Kalimantan Barat	1.603.559	1.451.606	224.996	997.707	228.903	207.372	7	1	5	1
15.	Kalimantan Tengah	675.398	664.973	56.237	592.973	15.663	110.812	6	1	5	0
16.	Kalimantan Selatan	1.334.953	1.228.102	304.716	881.987	41.399	112.810	10	2	7	1
17.	Kalimantan Timur	874.127	746.005	157.474	505.919	82.612	124.334	6	1	4	1
18.	Sulawesi Utara	1.348.093	1.312.877	71.064	1.148.651	93.162	218.813	6	0	5	1
19.	Sulawesi Tengah	822.926	787.670	94.150	654.742	38.778	196.918	4	1	3	0
20.	Sulawesi Tenggara	602.425	600.517	11.927	583.386	5.204	150.129	4	0	4	0
21.	Sulawesi Selatan	3.574.325	3.387.439	300.629	3.049.126	37.684	147.280	23	2	21	0
22.	Bali	1.632.600	1.525.896	25.398	1.338.876	161.622	190.737	8	0	7	1
23.	NTB	1.646.441	1.475.290	175.337	1.217.950	82.003	210.756	7	1	6	0
24.	NTT	1.671.657	1.629.216	21.330	1.543.497	64.389	135.765	12	0	11	1
25.	Maluku	870.914	825.124	109.570	672.281	43.273	206.281	4	1	3	0
26.	Irian Jaya	808.743	793.827	21.716	737.887	34.224	88.203	9	0	8	1
27.	Timor Timur	360.144	360.900	2.648	338.078	20.174	90.225	4	0	4	0
Jumlah		93.965.895	85.809.816	13.701.428	62.783.680	9.324.708		400	61	299	40

*Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) adalah bilangan hasil bagi dari pembagian jumlah suara yang diperoleh OPP dengan jumlah kursi DPR yang diperebutkan dan kemudian dibulatkan.

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIAP-TIAP OPP
DAN PERSENTASENYA UNTUK TAHUN 1982 DAN 1987**

No.	Daerah Pemilihan	1982		1987		1982		1987		1987		Jumlah		
		PPP	%	PPP	%	Golkar	%	PDI	%	PDI	%	1982	1987	
1.	DI Aceh	772.819	59,08	660.644	42,97	483.570	36,97	798.983	51,96	51.700	3,95	77.986	1.308.089	1.537.613
2.	Sumatra Utara	801.296	20,44	606.677	13,48	2.843.427	72,54	3.274.533	72,76	274.840	7,01	619.195	3.919.563	4.500.345
3.	Sumatra Barat	615.789	38,76	375.529	19,63	959.492	60,41	1.504.457	78,65	13.129	0,83	32.883	1.588.410	1.912.869
4.	Riau	276.678	25,78	203.555	15,04	769.131	71,69	1.078.942	79,73	27.072	2,52	70.810	1.072.881	1.353.302
5.	Sumatra Selatan	847.045	38,05	508.006	18,82	1.247.287	56,02	1.869.635	69,26	131.787	5,92	321.625	2.226.119	2.699.266
6.	Jambi	105.337	13,81	74.706	8,20	649.591	84,80	809.299	88,87	10.589	1,34	26.633	762.517	910.638
7.	Bengkulu	94.959	24,78	51.547	10,25	256.485	70,62	426.301	84,81	11.752	3,24	24.819	383.196	502.667
8.	Lampung	661.719	30,02	196.820	7,33	1.308.274	59,36	2.337.563	87,03	234.066	10,62	151.500	2.204.059	2.685.883
9.	DKI Jawa	1.268.878	39,20	851.456	21,42	1.456.216	44,99	1.996.837	50,23	511.710	15,81	1.126.859	3.236.804	3.975.152
10.	Jawa Barat	3.687.132	27,16	2.179.846	13,81	8.596.458	63,33	11.347.051	71,31	1.288.416	9,46	2.367.065	13.572.006	15.911.962
11.	Jawa Tengah	3.640.383	27,72	2.600.746	18,21	7.940.158	60,47	9.743.228	68,21	1.549.749	11,20	1.940.623	13.190.290	14.284.597
12.	DI Yogyakarta	336.664	23,34	227.846	14,49	873.260	60,55	1.103.429	70,19	232.257	16,10	240.836	1.442.181	1.572.111
13.	Java Timur	5.732.623	36,63	3.568.918	20,78	8.884.252	56,78	12.290.362	71,21	1.030.530	6,59	1.374.784	15.647.405	17.174.064
14.	Kalimantan Barat	260.722	20,72	224.996	15,50	892.801	70,99	997.707	68,73	109.070	8,28	228.903	1.257.593	1.451.606
15.	Kalimantan Tengah	76.392	14,55	56.237	8,46	442.197	84,22	592.973	89,19	6.435	1,22	15.663	525.024	664.873
16.	Kalimantan Selatan	426.485	39,64	304.716	24,81	637.397	59,25	881.987	71,82	11.833	1,10	41.399	1.075.715	1.228.102
17.	Kalimantan Timur	183.280	31,85	157.474	21,11	352.746	61,29	505.919	67,82	39.418	6,85	82.612	575.444	746.005
18.	Sulawesi Utara	76.060	6,76	71.064	5,41	979.486	87,12	1.148.651	87,49	68.666	6,10	93.162	1.124.212	1.312.877
19.	Sulawesi Tengah	104.343	15,52	94.150	11,95	546.468	81,29	654.742	83,12	21.379	3,18	38.778	672.190	787.670
20.	Sulawesi Tenggara	12.775	2,56	11.927	1,97	483.598	96,94	583.386	97,15	2.468	0,49	5.204	498.841	600.517
21.	Sulawesi Selatan	317.824	10,23	300.629	8,87	2.769.736	89,18	3.049.126	90,01	28.109	0,58	37.684	3.105.669	3.387.439
22.	Bali	26.444	2,00	25.398	1,66	1.203.101	88,34	1.338.876	87,74	132.209	0,97	161.622	1.361.754	1.525.896
23.	NTB	371.509	28,15	175.337	11,88	905.280	66,60	1.217.950	82,56	42.713	3,23	82.003	1.319.502	1.629.290
24.	NTT	19.100	1,29	21.339	1,31	1.419.204	96,35	1.543.497	94,74	34.656	2,35	64.389	1.472.960	1.629.216
25.	Maluku	134.597	18,96	109.570	13,28	534.086	75,24	672.281	81,48	41.115	5,79	43.273	709.798	825.124
26.	Irian Jaya	20.354	3,16	21.716	2,76	594.415	92,47	737.887	92,95	27.990	4,35	34.224	642.759	793.827
27.	Timor Timur	673	0,20	2.648	0,73	309.608	99,44	338.078	93,68	1.044	0,33	20.174	311.325	360.900
	Nasional	20.871.880	27,78	13.701.428	15,97	48.334.724	64,38	62.783.680	73,17	5.919.702	7,88	9.324.708	75.126.306	85.809.816

PEMBAGIAN KURSI DPR HASIL PEMILIHAN UMUM 1977, 1982, DAN 1987

No. Daerah Pemilihan	PPP			Golkar			PDI		
	1977	1982	1987	1977	1982	1987	1977	1982	1987
	1. DI Aceh	6	6	4	4	4	5	0	0
2. Sumatra Utara	4	4	3	12	14	15	4	1	3
3. Sumatra Barat	5	5	3	9	9	11	0	0	0
4. Riau	2	2	1	4	4	6	0	0	0
5. Sumatra Selatan	4	4	2	5	6	9	1	1	2
6. Jambi	1	1	1	5	5	5	0	0	0
7. Bengkulu	1	1	1	3	3	3	0	0	0
8. Lampung	2	2	1	5	5	9	1	1	0
9. DKI Jakarta Raya	5	5	3	5	6	8	2	2	4
10. Jawa Barat	14	13	8	33	32	44	3	5	9
11. Jawa Tengah	15	14	10	27	31	40	10	6	8
12. DI Yogyakarta	1	1	1	4	4	5	1	1	1
13. Jawa Timur	21	21	13	35	32	46	3	4	5
14. Kalimantan Barat	1	1	1	5	5	5	1	1	1
15. Kalimantan Tengah	2	1	1	4	5	5	0	0	0
16. Kalimantan Selatan	5	4	2	5	6	7	0	0	1
17. Kalimantan Timur	2	2	1	3	4	4	1	0	1
18. Sulawesi Utara	1	1	0	4	5	5	1	0	1
19. Sulawesi Tengah	1	1	1	3	3	3	0	0	0
20. Sulawesi Tenggara	0	0	0	4	4	4	0	0	0
21. Sulawesi Selatan	3	2	2	20	21	21	0	0	0
22. Bali	0	0	0	7	7	7	1	1	1
23. Nusa Tenggara Barat	2	2	1	4	4	6	0	0	0
24. Nusa Tenggara Timur	0	0	0	11	12	11	1	0	1
25. Maluku	1	1	1	3	3	3	0	0	0
26. Irian Jaya	0	0	0	8	8	8	1	1	1
27. Timor Timur	-	0	0	-	4	4	-	0	0
Jumlah	99	94	61	226	246	299	31	24	40